

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan jaman pada saat ini menjadikan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Banyaknya tingkat kebutuhan masyarakat menjadikan masyarakat banyak yang harus melakukan pinjaman pada lembaga keuangan demi memenuhi kebutuhan. Masyarakat pada umumnya juga banyak yang memilih melakukan pinjaman pada sebuah lembaga keuangan simpan pinjam yang memiliki bunga pinjaman rendah dan mendapatkan kemudahan saat akan melakukan pinjaman. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Dalam UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Adapun tujuan dari Koperasi bukan hanya untuk mendapatkan atau meningkatkan laba, tetapi lebih ditekankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No 27 tahun 2007. “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat

daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasimerupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional”. Dan tujuan dari koperasi yaitu sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) Menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Bentuk badan usaha atau perusahaan yang sesuai dengan maksud tersebut adalah Koperasi.

Menurut Arief Subyantoro (2015:5) , Koperasi berasal dari kata : Co dan operation, Co berarti bersama dan operation berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi “Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela.

Menurut Giri (2017), piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa tertentu pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini.. Akan tetapi piutang juga dapat menimbulkan resiko usaha apabila tidak dikelola dengan memperhatikan prosedur, pencatatan piutang, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pelaporan keuangan pada koperasi tersebut.Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam KSP Koptit Swasti Sari sudah melakukan prosedur, pencatatan piutang, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pelaporan keuangan. Namun penulis akan memperbandingkan antara

kebijakan pada Koperasi KSP Kopdit Swasti Sari dengan SAK ETAP. Adapun data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini adalah data piutang anggota koperasi KSP Kopdit Swasti Sari Kupang. piutang tersebut tergantung dengan kondisi kebutuhan anggota koperasi. Ketika kebutuhan meningkat maka jumlah piutang mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya”.

Menurut Penelitian sebelumnya Ariyanti dan Murniati, (2019) dalam judul penelitian “Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan SAK ETAP no.15 pada Koperasi PT. Pisma Putra Textile Pekalongan” menyimpulkan bahwa Pisma Putra Textile belum sepenuhnya menerapkan pengakuan, pencatatan, dan penyajian aset tetap koperasi sesuai standar akuntansi yang berlaku, mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan cara penyajian laporan keuangannya masih terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan kaidah perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.

Dalam penelitian Agustine, Rosyafah, dan Widya Susanti, (2015) menyimpulkan bahwa *Receivable turnover*, *average collection period*, dan rasio penagihan menunjukkan fluktuasi dimana, penurunan *Receivable turnover* berarti kenaikan bagi *average collection period* itu menunjukkan bahwa jangka waktu penagihan yang dilakukan manajemen koperasi kurang efektif dan efisien. Sedangkan penurunan rasio penagihan menunjukkan

aktifitas upaya penagihan yang dilakukan koperasi tidak baik.

Menurut Ikawati, dan Budi (2018) dalam judul penelitian Evaluasi Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bunga Dan Pinjaman Bunga Pada Laporan Keuangan Kopdit (CU) Ngudi Rahayu Berdasarkan Permen KUKM No. 13/PER.M.KUKM/IX/2015 dan SAK ETAP menyimpulkan bahwa Hasil dari penelitian ini yang telah dilakukan Kopdit Ngudi Rahayu serta berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan pendapatan bunga dan pinjaman bunga pada Kopdit Ngudi Rahayu telah dicatat sesuai dengan pos masing-masing. Pendapatan bunga dicatat dalam pos pendapatan, sedangkan pinjaman bunga dicatat sebagai biaya yang disajikan dalam laporan hasil usaha. Konsep yang digunakan dalam pencatatan transaksi telah sesuai dengan konsep yang digunakan berdasarkan aturan PERMEN dan SAK ETAP yaitu secara akrual, artinya transaksi diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi.

Meskipun badan hukum koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, tetapi dalam proses pelaporan keuangan khususnya piutang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa koperasi yang dalam penerapan perlakuan akuntansi piutang dan pelaporan keuangan koperasi belum sesuai dengan SAK ETAP (Livia, 2017). Dengan masih adanya hal tersebut maka akan berdampak juga pada perlakuan akuntansi dan juga laporan keuangan di koperasi. Peneliti memilih objek Koperasi Kopdit Swasti Sari di Kupang Maka dari itu penulis ingin meneliti apakah laporan keuangan khususnya piutang yang dihasilkan oleh koperasi

tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP atau tidak dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**” (Studi Kasus Pada Koperasi Kopdit Swasti Sari Kupang).

Tabel 1.1.  
Data Jumlah Piutang dan Jumlah Anggota  
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Piutang	Jumlah Anggota
2016	Rp.317.594.930.000	31.767 Orang
2017	Rp.384.208.211.800	39.255 Orang
2018	Rp.470.782.991.236	54.334 Orang
2019	Rp.585.009.412.022	81.599 Orang
2020	Rp.648.640.570.277	111.811 Orang
2021	Rp.727.667.269.559	141.335 Orang

*Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam KSP. Kopdit Swasti Sari Kupang.*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menyatakan bahwa data piutang anggota koperasi pada tahun 2016 sampai 2021, dari data tersebut terdapat jumlah piutang yang mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Sedangkan jumlah anggota juga mengalami kenaikan setiap tahun. “Perubahan jumlah piutang tersebut tergantung dengan kondisi kebutuhan anggota koperasi. Ketika kebutuhan meningkat maka jumlah piutang mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya”.

Piutang anggota merupakan salah satu sumber laba atau keuntungan bagi koperasi apabila dikelola dengan baik. Piutang tersebut merupakan suatu

aset yang menguntungkan bagi Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Swasti Sari Kupang. Pengelolaan piutang yang bisa dilakukan untuk pengambil keputusan adalah standar kredit, persyaratan kredit, serta kebijakan kredit dan pengumpulan piutang.

Prosedur peminjaman pada koperasi KSP Kopdit Swasti Sari Kupang adalah anggota mengajukan peminjaman dengan mengisi formulir permohonan pinjaman dengan menyertakan surat jaminan misal BPKB dan surat tanah. Surat permohonan diajukan kepada panitia kredit untuk mendapatkan pertimbangan kelayakan kredit. Kemudian petugas lapangan melakukan survey kepada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman. Permohonan disetujui apabila jumlah pinjaman tidak melebihi 5 kali dari jumlah simpanan sukarela. Dan tidak memiliki piutang lain.

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya perlakuan akuntansi piutang simpan pinjam, maka penulis tertarik untuk membahas ke dalam penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik” (Studi Kasus Pada Koperasi Kopdit Swasti Sari Kupang).**

## **1.2. Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “ Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di KSP.Kopdit Swasti Sari Kupang.

### **1.3. Persoalan Penelitian**

Persoalan dalam penelitian ini adalah Apakah perlakuan akuntansi piutang pada koperasi swastisari sudah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi piutang pada koperasi sudah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik
  - a. Bagi akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan memberikan informasi yang berkaitan tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
  - b. Bagi pembaca, secara umum hasil kerja ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi dan wawasan mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

## 2. Manfaat praktis

Bisa memberikan referensi terbaru atau yang lebih akurat bagi Koperasi secara detail pada Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, paling tidak sebagai referensi dalam mengambil keputusan pengembangan kedepan